TL 3770

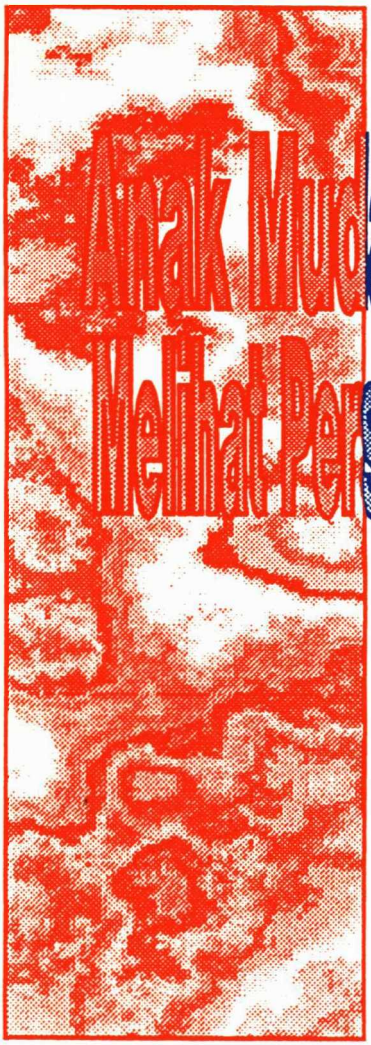

Anak Muda Timor Timur Melihat Persoalan Bangsanya

PIJAR

Anak Muda Timor Timur Melihat Persoalan Bangsanya

PIJAR

TL3770-1

MENGAPA MEREKA BERJUANG

Buku kecil yang sedang ada di hadapan Anda saat ini adalah pleidoi dari Fernando de Araujo, seorang mahasiswa Timor Timor yang dijatuhi hukuman 9 tahun penjara karena didakwa melakukan tindakan subversi oleh pemerintah Soeharto. Ia dinyatakan bersalah karena dianggap sebagai otak demonstrasi sejumlah mahasiswa Timor Timur, pada tanggal 19 November 1991, ke beberapa kedutaan besar asing di Jakarta, sebagai protes terhadap masakri di pekuburan Santa Cruz, Dilli, yang menyebabkan kematian puluhan hingga ratusan jiwa rakyat Timor Timur. Selain itu, ia juga dipersalahkan sebagai pimpinan dari *Renetil*, sebuah organisasi perlawanan mahasiswa dan pelajar Timor Timur yang mengkoordinir kegiatan menentang penyatuan dan masuknya Timor Timur sebagai bagian teritorial republik Indonesia.

Fernando, yang dalam kegiatan klandestin biasa dipanggil *La Sama*, adalah salah seorang generasi muda terkemuka Timor Timur yang menggunakan gerakan legal maupun ilegal untuk mengekspresikan secara terbuka pendapat dan pilihannya bagi kemerdekaan Timor Timur. Ia, dengan sadar dan realistis mengajukan referendum dan konsep *self-determination* sebagai solusi persoalan Timor Timur. Baginya, apapun yang menjadi pilihan rakyat bila itu melalui referendum yang berjalan bebas dan diawasi langsung oleh PBB maupun pengamat internasional yang *fair*, akan menjadi pilihan demokratis yang dipatuhinya. Tetapi, di mata pemerintah Soeharto, solusi demokratis tersebut adalah pembangkangan. Pemerintah Soeharto tetap bersikeras bahwa Timor Timur sudah menjadi bagian sah teritorial Indonesia. Dengan demikian tidak perlu dilakukan referendum, mengingat sebagian rakyat Timor Timur sejak awal sudah menyatakan integrasi melalui deklarasi Balibo. Integrasi adalah kata akhir yang tidak bisa diubah. Selain

itu, pemerintah Soeharto juga berargumentasi bahwa pembangunan dan kesejahteraan rakyat Timor Timur saat ini telah jauh lebih baik dibanding masa penjajahan Portugal dulu. Pemerintah Soeharto menegaskan, kalau ada yang berbicara tentang persoalan Timor Timur, itu hanyalah segelintir orang Timor Timur yang keras kepala dan disuap pemerintah Portugal.

Senyatanya, persoalan Timor Timur tidak sesederhana yang digembor-gemborkan oleh pemerintah Soeharto. Ini diakui sendiri oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas ketika ia mengatakan, "Timor Timur menjadi batu kerikil yang tajam bagi diplomasi Indonesia di dunia internasional" [1]. Pemerintah Soeharto sudah berusaha keras dengan mengandalkan reputasinya sebagai ketua Gerakan Non-Blok dan sebentar lagi sebagai anggota Dewan Keamanan PBB untuk mempengaruhi opini masyarakat internasional. Namun usaha tersebut tidak menemui titik terang. Sampai detik ini PBB tetap tidak mengakui Timor Timur sebagai bagian teritorial Indonesia. Sampai detik ini sebagian rakyat Timor Timur pun masih bergejolak dan tetap menginginkan kemerdekaan.

Sikap sebagian rakyat Timor Timur tersebut sebetulnya tidak mengherankan. Pemerintah Soeharto memang sudah berusaha keras mencari simpati dan dukungan rakyat Timor Timur. Dana pembangunan bagi Timor Timur dialokasikan lebih besar ketimbang daerah dan propinsi lainnya. Pembangunan prasarana dan infrastruktur fisik di sana berjalan pesat. Tapi rakyat Timor Timur tidak menunjukkan antusiasme dan respon yang setimpal. Bagi kebanyakan rakyat Timor Timur pembangunan fisik bukan jawaban persoalan mereka; karena kebebasan, independensi, dan kreativitas yang menjadi keinginan mereka. Lebih-lebih di balik gemerlapnya pembangunan fisik kemudian muncul problem riil di sana. Dengan digabungkannya Timor Timur menjadi teritori Indonesia, pemodal asing (baca: Indonesia) yang berkolusi dengan birokrasi, masuk dan mengeksploitasi

sumber daya di sana hingga menyisihkan penduduk asli setempat. Posisi-posisi strategis dalam pemerintahan sipil, lokal, maupun ketentaraan kebanyakan diduduki oleh pendatang, sementara penduduk setempat hanya menduduki jabatan bawahan. Selain itu, budaya lokal yang sebelumnya menjadi orientasi nilai rakyat Timor Timur secara perlahan dirusak dan diganti. Akibatnya, sebagian besar rakyat Timor Timur mengalami disorientasi. Mereka merasa sebagai masyarakat pinggiran yang teralienasi dari *local genius*nya sendiri [2]. Semua itu, masih ditambah lagi dengan represi dan penggunaan alat kekerasan oleh militer. Teror dan intimidasi menjadi bagian dari kehidupan 'normal' sehari-hari, membuat sebagian rakyat Timor Timur menjadi kecewa dan trauma. Kita jangan lupa bahwa hampir seperempat rakyat Timor Timur kehilangan sanak-saudaranya akibat perang maupun menjadi korban pelanggaran hak asasi. Sampai sekarang data yang pasti mengenai jumlah sebenarnya belum ada, tapi minimal, seperti yang pernah dikatakan oleh Abilio Soares, Gubernur Timor Timur saat ini, "Sebanyak 200 ribu rakyat Timor Timur kehilangan jiwanya" [3].

Sebaliknya dari perspektif Indonesia, kalau mau jujur, persoalan Timor Timur juga tidak sederhana. Karena apabila pemerintah Soeharto mundur dari Timor Timur, maka persoalannya bukan hanya kehilangan muka secara politik tapi juga harus memberikan pertanggung jawaban atas jumlah militer Indonesia yang tewas sebagai korban peperangan. Militer Indonesia bisa mengalami demoralisasi dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah Soeharto. Persoalan pun akan menjadi bertambah rumit bila Timor Timur dilepaskan, karena bagi beberapa pihak akan menjadi preseden mengingat kepulauan Nusantara yang kompleks dengan problem separatis dan etnik.

Dewasa ini, penyelesaian persoalan Timor Timur masih jauh dari memuaskan. Pihak perlawanan maupun pemerintah Soeharto tetap bersikeras pada posisi masing-masing. Upaya PBB sebagai penengah dengan memper-

temukan Indonesia dan Portugal, dilengkapi kedua belah kubu rakyat Timor Timur yang bertentangan; berjalan lamban. Prioritas pertama PBB adalah menghentikan pelanggaran hak asasi di Timor Timur. PBB bahkan sudah beberapa kali mengirimkan *special rapporteur* agar mendapatkan keterangan faktual yang sesungguhnya. Sayang, hingga saat ini laporan itu belum juga diterbitkan.

Lepas dari upaya menengahi yang dilakukan PBB, ada sebuah pertanyaan yang sesungguhnya penting diketahui jawabannya bagi pemecahan persoalan di Timor Timur, tetapi diabaikan oleh banyak pihak, yaitu: bagaimana pandangan rakyat Indonesia sesungguhnya terhadap persoalan Timor Timur. Apakah rakyat Indonesia setuju dengan kebijakan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah Soeharto? Kalau beberapa pihak selama ini menuntut diadakan referendum bagi penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur, seharusnya referendum serupa juga diadakan bagi rakyat Indonesia untuk mengetahui apakah rakyat Indonesia setuju Timor Timur menjadi bagian teritori republik Indonesia? Kebijakan pemerintah tidak selalu identik dan mewakili kemauan rakyatnya, apalagi bila cara-cara yang ditempuh tidak demokratis. Sebab, jika rakyat Indonesia konsisten dengan amanat pembukaan UUD 1945, "bahwa kemerdekaan sesungguhnya adalah hak segala bangsa", maka kemerdekaan sebetulnya bukanlah impian yang terkutuk [4].

Dengan membaca pleidoi ini, kita akan mengetahui bagaimana pandangan dan pilihan seorang generasi muda Timor Timur terhadap nasib bangsanya. Mengapa mereka berjuang dan menginginkan kemerdekaan. Paling tidak, kita mengetahui sisi lain dari pandangan yang selama ini dipaparkan oleh pemerintah Soeharto, sehingga kita bisa melihat permasalahan Timor Timur dengan lebih obyektif. Cita-cita Fernando akan kemerdekaan dan perbaikan hak asasi, apapun posisi yang ia pilih, patut kita hargai. Kalau mau dianalogikan, Fernando cukup pantas disejajarkan

dengan mendiang Mohammad Hatta, mantan wakil presiden pertama republik Indonesia, yang ketika menjadi mahasiswa di negeri Belanda diadili oleh pemerintah kolonial Belanda karena memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Hanya saja, Mohammad Hatta dinyatakan tidak bersalah berkat kejujuran dan kebebasan peradilan di sana. Sementara Fernando bernasib lain, ia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Tapi itu tidak membuat dunia melupakannya. Pada tahun 1992 ia dianugerahi *Reebook Human Right Award*, sebuah penghargaan hak asasi yang salah satu jurinya adalah mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter.

Jakarta, 10 Desember 1994,

CoKi

1.Lihat Adam Schwarz, *A Nation In Waiting: Indonesia In The 1990*, Allen & Unwin, Australia, 1994, hal. 195.

2.Lihat Mubyarto, et.al, *East Timor: The Impact Of Integration*, IRIP, December 1991, Australia.

3.Lihat wawancara Abilio Soares dalam majalah Editor dan Forum Keadilan, Maret/April 1994.

4.Kalimat tersebut terinspirasikan oleh cerpen Seno Gumira Ajidarma yang berjudul "Rosario". Lihat buku *Saksi Mata* yang merupakan kumpulan cerpennya, diterbitkan oleh Benteng, Yogyakarta, 1994.

TL3770-2

MENGAPA DAN UNTUK APA AKU BERJUANG

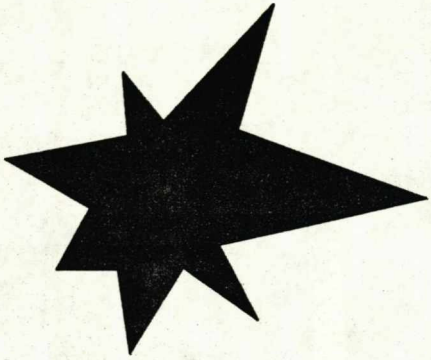

PEMBELAAN FERNANDO DE ARAUJO
TERHADAP TUNTUTAN TIM PENUNTUT UMUM
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
Jakarta, 11 Mei 1992

DEMI PENENTUAN NASIB
SENDIRI RAKYAT MAUBERE

I. PENGANTAR

Majelis Hakim yang mulia, Penuntut Umum yang berbahagia, Penasehat Hukum yang budiman serta hadirin yang kami hormati.

Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya kami sempat mengikuti sidang ini dari awal hingga saat ini memasuki tahap pembelaan.

Doa selalu kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar selalu memberi terang bagi seluruh umatNya untuk melihat dan menjunjung tinggi kebenaran hakiki yang telah difirmankanNya. Kami berdoa khusus kepada Tuhan agar menambah kekuatan kepada Majelis Hakim agar selalu menjamin keindependenan dari Pengadilan ini dengan memperhatikan semua aspek yang berkaitan dengan kasus kami terutama aspek hukum internasional yang merupakan dasar pijakan kami dalam bertindak yang mana aspek tersebut merupakan kekuatan yang mengikat kita semua.

Majelis hakim yang mulia sebagai bahan pertimbangan maka dalam kesempatan pembelaan ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal, yang berupa fakta dan pendapat baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan masalah/kasus kami.

Tuntutan lima belas (15) tahun penjara bagi kasus subversi seperti yang dituntut terhadap kami kemungkinan adalah sesuai dan relevan bagi warga negara Indonesia, namun bagi kami putra Timor Timur yang secara murni memperjuangkan hak asasi kami yaitu hak penentuan nasib sendiri adalah sesuatu yang tidak etis, tidak masuk diakal dan tidak dapat diterima. Penuntut Umum mengambil undang-undang peninggalan penjajah yang telah diadaptasikan untuk menuntut kami pada era demokrasi ini. Marilah kita

menegakkan demokrasi karena angin dunia menghendaki demikian. Hak kemerdekaan, hak penentuan nasib, hak hidup, hak mengeluarkan pendapat/mengatakan aspirasi hak untuk menghirup udara bebas di luar penjara adalah hak asasi atau hak kodrati. Pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur adalah suatu kenyataan yang tidak bisa ditutupi karena ketransparan dunia sekarang ini sehingga janganlah berusaha untuk menutupi.

Masalah Timor Timur bukan merupakan masalah dalam negeri Indonesia masalah Timor Timur adalah masalah dunia/masalah internasional sehingga harus diselesaikan melalui jalur diplomasi bukan dengan jeruji besi melalui proses peradilan dan pembantaian melalui picu senjata. Pemaksaan dengan ancaman kurungan penjara sebagai penyelesaian adalah kasus jalanan yang biasa dikenal dengan istilah main hakim sendiri, yang lebih bertenaga akan berbuat semaunya terhadap yang kurang bertenaga.

Pada tahun 1975 tanggal 7 Desember rakyat Timor Timur langsung mengambil senjata untuk melawan kaum invasor Indonesia dengan hasrat untuk mempertahankan kemerdekaan dan membela hak asasinya, jiwa raganya dikorbankan untuk membela haknya, membela budaya dan tradisinya, identitasnya sebagai suatu bangsa di muka bumi ini. Tanggal 12 Desember 1975 organisasi tertinggi dunia yaitu PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang mana Indonesia merupakan bagiannya melalui sidang umum telah mengeluarkan resolusi nomor 3485 yang isinya antara lain merekomendasikan kepada Indonesia untuk menghormati hak kemerdekaan dan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Tanggal 24 Desember 1975 Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi bernomor 384 yang isinya mendesak Indonesia untuk menghormati hak kemerdekaan dan hak penentuan nasib sendiri serta menghormati teritori Timor Timur, mendesak Indonesia untuk menarik pasukannya dari Timor Timur.

Tanggal 22 April 1976 Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan lagi suatu nomor 389 yang bunyinya antara lain meminta pada seluruh negara untuk menghormati integritas wilayah Timor Timur dan hak penentuan nasib sendiri *concern* dengan resolusi 1514 (XV), mendesak Indonesia untuk menarik mundur pasukan dari Timor Timur. Resolusi-resolusi tersebut dikeluarkan secara berlanjut dari tahun 1975 hingga tahun 1981. Pada tahun 1982 masalah Timor Timur tidak lagi didiskusikan di dalam sidang umum PBB, mulai tahun itu Sekjen PBB yang menangani langsung dengan merekomendasikan kepada pemerintah Portugal dan pemerintah Indonesia untuk berdialog dengan tujuan untuk mencari suatu penyelesaian secara pasif dan diterima oleh masyarakat internasional. Dialog itu berlangsung dari tahun 1982 hingga tahun 1991. Dialog tersebut berlangsung dibawah pengawasan langsung dari Sekjen PBB Xavier de Gueller. Tidak dibicarakan masalah Timor Timur dalam sidang umum PBB tidak berarti masalah Timor Timur telah terhapus dari agenda PBB. Dalam pertemuan antara Sekjen PBB Xavier de Gueller dengan *Parliament for East Timor* pada bulan Maret 1991 di New York de Gueller mengatakan bahwa suatu resolusi yang telah dikeluarkan dan belum dimaterialisir maka sampai kapanpun resolusi tersebut masih berlaku.

Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa masalah Timor Timur belum selesai dan bukan merupakan masalah dalam negeri Indonesia telah ditegaskan oleh Presiden Suharto dalam pernyataan yang diberikan di Kompas terbitan tanggal 18 April 1992 sebagai jawaban atas anjuran Sekjen PBB, Presiden Suharto mengatakan bahwa Indonesia bersedia untuk melayani upaya PBB dalam mencari penyelesaian masalah Timor Timur di PBB, yaitu penyelesaian yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Pernyataan tersebut mengatakan terang-

terangan kepada jaksa dan saya serta seluruh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia bahwa masalah Timor Timur belum selesai dan perlu mencari penyelesaian di PBB; sekaligus mengatakan bahwa masalah Timor Timur bukan masalah dalam negeri Indonesia.

Undang-Undang nomor 7 tahun 1976 dan TAP-TAP MPR serta Kepres-Kepres yang dipakai oleh Jaksa sebagai dasar untuk menuntut kami adalah sesuatu yang tidak berdasar dan itu hanya merupakan klaim sepihak pemerintah Indonesia untuk mencaplok Timor Timur; tidak berdasar karena:

- sebelum invasi Timor Timur telah memproklamasikan kemerdekaannya.
- mayoritas rakyat Timor Timur telah mengangkat senjata untuk melawan pendudukan Indonesia atas Timor Timur.
- sebelum diundangkan undang-undang tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan tiga resolusi yaitu resolusi nomor 3485 (1975) SU, 384 (1975) DK dan 389 (1976) DK yang isinya menentang pendudukan Indonesia di Timor Timur.

Penyelesaian yang dapat diterima oleh masyarakat internasional kiranya tidak berarti harus memenjarakan semua orang yang menentang pendudukan atas Timor Timur juga tidak berarti harus membantai semua orang yang ingin mengatakan aspirasinya secara terbuka.

Sering kita berbicara tentang demokrasi, dan demokrasi merupakan suatu topik yang amat sangat menarik untuk dikaji untuk diseminarkan dan lain-lain, apalagi dengan orientasi dunia sekarang ini semua negara di dunia ini saling bersaing dalam hal demokrasi untuk mengatakan kepada yang lain bahwa dialah negara yang paling demokratis.

Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi yang bisa menjamin hak warga negaranya untuk berserikat, bebas berbeda pendapat, bebas untuk mengeluarkan

pendapat. Indonesia adalah salah satu pemrakarsa gerakan non blok, memprakasai Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang telah menghasilkan Dasa Sila Bandung, Indonesia sebagai anggota PBB yang sangat aktif dalam mengirim pasukan perdamaian ke Kongo, Namibia, Kwait Kamboja dan lain-lain. Pengiriman pasukan perdamaian tersebut tidak lain adalah untuk mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan PBB. Dan bagaimana dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah dikeluarkan, kedok saja untuk menentukan arang yang telah mencoreng?

Kehadiran Indonesia di Timor Timur telah mencabut hak hidup dari dua ratus ribu lebih penduduk sipil, mencabut hak kebebasan rakyat untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat. Berusaha untuk menukar hak asasi dengan rumah tingkat, jalan beraspal mobil plat merah. Telah diterapkan pula ide-ide penjajah dan yang paling menonjol adalah politik *div'de et impera* suatu politik pecah belah dengan membayar dan membentuk grup-grup diantara rakyat sendiri untuk saling memata-matai. Konsekuensinya rakyat saling bermusuhan dan tidak dapat lagi terbina suatu kerukunan, saling pengertian, keharmonisan dan ketentraman yang merupakan wasiran nenek moyang yang sesuai dengan filsafat hidup masyarakat Timor Timur yang berbunyi *'Matak ida-ida nian tasak han humutuk'* yang artinya sesuatu makanan yang masih muda atau mentah adalah milik pribadi tetapi setelah matang atau masak adalah milik bersama. Bangsa Barat kulit putih yang menjajah Timor Timur selama 450 tahun telah diusir oleh rakyat dengan kekuatannya sendiri hampir sama dengan bangsa Indonesia pada 1947 dan 1948 harus menggerakkan seluruh kekuatan rakyatnya untuk melawan Belanda yang berkeinginan untuk menganggu gugat kemerdekaan yang telah diproklamasikannya. Pergerakan dan perlawanan rakyat adalah demi satu-satunya harapan, merdeka.

II. a). TIMOR TIMUR SEBELUM PENDUDUKAN INDONESIA

Sebagai suatu bangsa Timor Timur memiliki identitas budaya, sejarah sistem politik dan filsafat hidupnya tersendiri.

Sebelum kedatangan bangsa Portugis Timor Timur merupakan suatu monarki yang dipimpin oleh kerajaan-kerajaan yang sangat independen antara yang satu dengan yang lainnya. Hidup berdampingan dengan saling menghormati batas suku dan tradisinya masing-masing. Kerajaan kecil tersebut dapat diketahui batas wilayahnya dari bahasa-bahasa yang ada yang berjumlah 32 bahasa. Kenyataan yang ada antara satu suku dengan suku yang lain memiliki tradisi dan kebiasaan hidup yang berbeda. Sesuai dengan perkembangan dan perubahan waktu maka di Timor Timur juga telah mengalami proses akulturasi dan asimilasi kebudayaan antara budaya dan tradisi setempat juga dengan budaya daan kebiasaan hidup dari bangsa penjajah dan bangsa lain yang pernah singgah di Timor Timur dengan tujuan perdagangan.

Pada tahun 1516 para misionaris Portugis setelah singgah lebih dulu di pulau-pulau di Asia singgah juga di Timor Timur. Sesuai dengan tujuan misi utama mereka maka tidak langsung mereka menentukan hal pemerintahan melainkan mereka mendekati lebih dahulu para raja yang ada untuk menyebarkan agama Nasrani Katolik di wilayah itu. Sesuai dengan misinya pula maka mereka tidak mendaratkan marinir Portugis, tidak menerjunkan pasukan tidak menurunkan pasukan darat dengan segala jenis persenjataannya seperti dilakukan oleh Indonesia pada tahun 1975. Yang didaratkan pertama oleh bangsa Portugis adalah Salib Kritus. Dengan segala pendekatan keagamaan dan pendekatan kemanusiaan maka perlahan tapi mantap raja-raja dapat

ditaklukkan. Pendekatan yang dimaksud adalah suatu pendekatan yang tidak mendesak atau memaksa, tidak pula dengan jalan intimidasi melainkan suatu usaha untuk mengambil hati para raja-raja yang ada dengan tetap menghargai kekuasaan mereka, adat istiadat mereka kebebasan mereka dan lain-lain. Dalam penyebaran agama orang Portugis tidak langsung mengatakan bahwa animisme yang dianut orang masyarakat Timor pada waktu itu tidak baik, namun selalu diberikan kebebasan agar kedua aliran itu hidup berdampingan. Memang patut kita mengakui bahwa bangsa barat lebih maju peradabannya dari pada bangsa-bangsa timur sehingga dalam hal pergaulan atau pendekatan sosiologis pun kita masih ketinggalan dibandingkan dengan mereka. Sepantasnya kalau kita meniru cara-cara mereka terutama dalam tindakan sosiologis yang berbau kemanusiaan. Dapat kita melihat contoh lain yaitu Bung Karno yang sudah mulai menentang penjajah Belanda pada masa perkuliahannya namun dia tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya.

Untuk menjalankan pemerintahan Portugis di Timor Timur agamalah yang merupakan jalur utama, setelah agama merasuk pada raja-raja yang berkuasa baru kemudian mereka memasukan pemerintahan. Struktur pemerintahannya ialah layaknya struktur pemerintahan suatu propinsi yang merupakan salah satu propinsi dari negara Portugal yang disebut propinsi seberang laut atau dalam bahasa Portugisnya dinamakan *provincia ultramarina* dengan nama Timor. Pemerintahan di Timor dikepalai oleh seorang gubernur dan terdiri dari 13 wilayah kabupaten lengkap dengan aparat pemerintahannya dari bupati, camat, lurah sampai ke RT. Bupati disebut *administrador*, camat disebut *chefe do posto*, lurah disebut *chefe do suku* dan RT disebut *chafe povoacao*. Perbedaannya dengan yang dijalankan oleh Indonesia sekarang adalah hanya namanya saja dan

dalam segi operasionalnya letak perbedaannya adalah pada faktor zaman yaitu zaman pendudukan Indonesia zaman kemerdekaan dan zaman hak asasi sesuai dengan tuntutan dunia sedangkan zaman pendudukan Portugis adalah zaman penjajahan. Portugal dikepalai oleh seorang presiden seperti di Indonesia. Masyarakatnya juga memiliki kartu tanda penduduk yang disebut *bilhete de indentide*, ada juga sekolah di Timor Timur yang kebanyakan pelajarannya orang pribumi Timor Timur.

Dalam segi kekayaan alam sejak dulu Portugal sudah tahu bahwa di laut Timor ada kandungan minyak yang tergolong terbesar di dunia, ada kayu cendana yang mungkin hanya terdapat di alam pulau Timor, ada uranium yang mana Portugal lebih dekat dengan negara-negara industri yang sangat membutuhkan uranium untuk dipakai sebagai bahan mentahnya. Sudah tahu ada kekayaan alam di sana (Timor Timur) tapi Portugal tidak memaksa diri untuk mengeksploitirnya karena itu adalah hak milik rakyat Timor Timur. Apakah Portugal tidak punya kemampuan untuk mengekploitasi kekayaan alam tersebut ? Apakah Portugal tidak mempunyai fasilitas untuk melaksanakan hal tersebut ? Apakah seandainya ada tawaran dari Portugal kepada negara-negara industri seperti Jerman, Jepang dan lain-lain untuk bekerja sama dalam mengekploitasi kekayaan alam tersebut, tidak pernah akan ada tanggapan positif ? Barangkali dibilang bahwa kemauan itu ada, tapi letak geografisnya yang tidak mendukung dan Portugal tidak memiliki fasilitas untuk mengangkut karena kerja sama perdagangan dunia pada abad XII, XIII dan sampai sekarang ini sudah maju saling ketergantungan sudah tinggi.

Pada masa pendudukan pemerintahan Portugal tidak pernah ada transmigrasi dari Lisabon, tidak pernah ada orang kulit putih datang melamar pekerjaan di Timor Timur, tidak pernah didatangkan tukang bakso, tidak pernah ada intel berkeliaran di desa-desa, tidak pernah

ditempatkan satu peleton atau lebih tentara di setiap desa untuk menteror atau mengintimidasi rakyat. Sapi, rumah, kebun rakyat tidak pernah dikenakan pajak demikian juga rumah sakit, orang sakit berhak mendapat pelayanan medis karena pemerintahan telah menyediakkan dana untuk itu. Jarang ada korupsi karena cara hidup dan masalah perekonomian tidak memaksa demikian, dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah ada pemeriksaan KTP (*billlhete de identidade*), tidak pernah ada surat jalan (*guia da marcha*) kalau orang hendak pergi dari Ainaro ke Dili. Demikian juga dari Dili atau Ainaro ke kabupaten lain. Sering-sering diberi alasan bahwa pemeriksaan itu berlaku karena Timor Timur masih merupakan daerah operasi. Operasi/perang melawan siapa? Bukanlah orang sering mengatakan bahwa rakyat sudah menerima semua integritas sebagai jalan hidup mereka ? Apakah di Timor Timur masih ada orang kulit putih yang masih berperang melawan pendudukan ini ? Orang kulit putih telah diusir oleh rakyat Timor Timur tanpa minta bantuan dari Indonesia. Mengusir penjajah Portugis bukan karena bosan akan kulitnya orang Portugis yang putih sehingga menghendaki pergantian kulit tetapi mengusir karena rakyat Timor Timur menyadari bahwa hak kemerdekaannya telah dicopot, diinjak-injak selama 450 tahun. Bukan menghendaki bangsa Portugis menggantikan kulitnya memnjadi sawo matang.

Dalam pergaulan orang sering suka membuat perbandingan zaman, Timor Timur dulu dengan Timor Timur sekarang. Kiranya membuat suatu perbandingan antara hari ini dengan berpuluh tahun yang lalu adalah suatu yang tidak logis, tahun-tahun lalu merupakkan sejarah dan sejarah dipelajari ataupun ditulis bukan membuat perbandingan dalam hal pembangunan. Apalagi membuat perbandingan tentang Timor Timur, era pendudukan dulu adalah era penjajahan dan era sekarang adalah era pembangunan dan era hak asasi.

Sebenarnya perbandingan ini tidak perlu dibuat atau ditanyakan karena setiap orang pasti tahu bahwa hari kemarin dan hari ini tidak sama, satu pohon yang ditanam setahun yang lalu tingginya dengan seminggu yang lalu dan dengan hari ini tidak sama, tidak samanya itu karena proses alamiah. Kalau berbicara tentang pembangunan maka hendaknya kita kembali ke sejarah yaitu jaman batu. Dalam sejarah kita kenal adanya jaman batu tua, jaman batu media dan jaman batu baru dan seterusnya.. Proses perkembangan itu berkembang sesuai dengan proses peradaban manusia dan proses waktu serta tuntutan jaman. Proses demikian berjalan tanpa adanya suatu jangka pendek maupun jangka panjang.

Sesuai dengan perkembangan jaman dan perkembangan tingkat peradaban manusia maka Timor Timur pun tersentuh juga oleh proses yang demikian, di Timor Timur sebelum tahun lima puluhan pastor-pastor orang Eropa semua dan sesudah tahun itu mulai ada juga pastor orang pribumi, di dalam pemerintahan yang sebelum tahun enam puluhan dari camat sampai gubernur orang kulit putih semua mulai pada tahun akhir enam puluh ada camat orang asli Timor Timur. Seandainya situasinya masih bertahan sampai sekarang maka ada kemungkinan gubernur Timor Timur orang pribumi seperti yang ditempatkan oleh Indonesia di Timor Timur sekarang ini. Biarpun pemerintah Portugal telah mengangkat seorang putra Timor Timur sebagai gubernur untuk memimpin di sana (Timor Timur) namun itu adalah tetap sebagai daerah jajahan karena gubernur itu selalu diatur dan dikendalikan oleh presiden dari Portugal.

Konsep mengenai menjajah tidak terbatas pada pendudukan bangsa kulit putih wilayah masyarakat kulit hitam atau coklat. Menjajah berarti bangsa yang disebut penjajah itu ikut mengatur dan mengendalikan peraturan-peraturan yang berlaku dalam wilayah yang

dijajah, penjajah berlaku sebagai majikan dari masyarakat yang dijajah, masyarakat yang dijajah tidak bebas berserikat, mengeluarkan pendapat dan lain-lain. Dalam konteks yang lebih luas lagi dapat kita ambil contoh seperti orang sering mengatakan bahwa Jepang telah menjajah dunia dari segi ekonomi, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia dari segi ekonomi sehingga Indonesia menolak bantuan dari pemerintah Belanda. Amerika disebut sebagai polisi dunia sehingga boleh dikatakan telah menjajah dunia karena Amerika selalu memaksa kehendaknya melalui dewan keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Karena berlaku sebagai majikan segala cara agar masyarakat yang dijajah itu menuruti kamauannya.

Karena menyadari haknya untuk merdeka dan tidak mau dijajah lagi maka pada tahun 1912 raja Boaventura telah memimpin suatu pergolakan yang dikenal dengan nama pergolakan Manufahi. Raja Bentura (Boaventura) sebelumnya telah mengkordinir seluruh raja yang ada Timor Timur dan juga telah mencapai kesepakatan dari mereka para raja untuk mengusir penjajah Portugis dari Timor Timur namun karena kesulitan komunikasi maka tidak bisa beraksi dalam satu kesatuan waktu sehingga tentara Portugis menggunakan kelemahan tersebut untuk menguasai kembali keadaan setelah terjadi pertempuran beberapa bulan lamanya. Pergolakan tersebut telah memberi inspirasi kepada rakyat Maubere akan haknya serta bagaimana kewajibannya terhadap bangsanya.

Mengusir penjajah dan mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa sudah ada dalam hati sanubari rakyat Timor Timur sejak tahun 1912. Mengatakan bahwa bangsanya sendiri berhak untuk merdeka maka bangsa tersebut harus juga menghargai dan mengakui bangsa lain untuk merdeka pula. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, tidak dibatasi bahwa kemerdekaan ialah hak bangsa-bangsa yang besar

dan kuat. Bangsa yang kuat jangan merekayasa alasan-alasan untuk mencaplok hak bangsa yang kecil.

b). Revolusi di Portugal

Tanggal 25 April 1974 terjadi revolusi yang dinamakan revolusi mawar atau dalam Portugalnya disebut *revolucao das rosas*. Akibat dari revolusi tersebut terjadi kekacauan dalam tubuh pemerintahan Portugis dan pengaruh dari revolusi itu membuat pemerintah Portugis mendapat kesulitan untuk mengontrol daerah jajahannya maka oleh presiden Portugal diumumkan tanggal revolusi tersebut yaitu tanggal 25 April 1974 sebagai hari kebebasan dengan mengumumkan pula kepada propinsi-propinsi seberang laut untuk menentukan nasibnya sendiri-sendiri. Propinsi-propinsi itu bebas untuk mendirikan partai-partai politik dan membuat kampanye-kampanye menurut keyakinan politik masing-masing.

Menentukan nasib sendiri artinya terjaminnya suatu kebebasan bagi suatu masyarakat, tanpa tekanan dalam bentuk apapun untuk memilih sendiri masa depan politik bagi masyarakat yang bersangkutan. Suatu proses mengatakan aspirasi yang lebih dulu dikuasai oleh kekuatan militer atas suatu wilayah maka proses penentuan nasib sendiri tidak akan berjalan sewajarnya dan itu bukan namanya penentuan nasib sendiri melainkan ada usaha nyata-nyata dari bangsa lain untuk menentukan masa depan politik suatu bangsa. Untuk bisa terjaminnya suatu proses penentuan nasib sendiri yang sewajarnya maka badan-badan yang berwewenang dan terkait harus menciptakan kondisi dan situasi yang bebas aman dan tentram dengan berorientasi pada pemikiran demokratis dengan menghargai suara mayoritas dalam suatu masyarakat atau masyarakat subyek dari hal penentuan tersebut. Penentuan nasib yang wajar ialah

dalam situasi yang bebas dimana rakyat langsung memilih atau dikenal dengan istilah *one man one vote* dan diwakili ataupun musyawarah untuk mufakat.

Dari hasil kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal semua daerah jajahannya telah memperoleh kemerdekaan seperti Anggola, Mozambique, Guine Bisau, Coba Verde dan Timor Timur juga telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 28 November 1975.

Poklamasi itu merupakan realisasi dari suara mayoritas rakyat Timor Timur untuk mengatakan haknya seperti tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Mengapa negara ini harus mencari dalih untuk mengganggu kemerdekaan rakyat Timor Timur ? Apakah dari situ dapat diakui bahwa sebagian kecil dari rakyat Timor Timur yang mengungsi ke daerah Nusa Tenggara Timur mewakili rakyat Timor Timur, apakah cara demikian telah memenuhi syarat-syarat penentuan nasib sendiri yang wajar ?

Memang pantas dunia mengagumi Pancasila dan UUD'45 karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila benar-benar luhur dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai benar dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga pas benar dengan tuntutan dunia pada era sekarang ini. Tetapi dalam penerapannya tidak mencerminkan nilai-nilai luhur tersebut. Dalam butir-butir Pancasila tidak ada mengenai pembantaian, tidak terkandung mengenai pencaplokan dan hal-hal lain tentang kekerasan, masyarakat Indonesia harus bersyukur karena Tuhan telah mengkaruniainya melalui pemimpin-pemimpinnya yang dulu suatu ideologi yang sangat luhur. Namun sayang karena nilai-nilai luhur itu telah dihianati oleh penguasa-penguasa negara ini.

c). Munculnya Partai-Partai Politik di Timor Timur

Angin kebebasan yang diumumkan di Portugal pada tanggal 25 April 1974 akhirnya berhembus di Timor Timur. Rakyat menyambutnya dengan segala keramaian karena menyadari bahwa telah tiba saatnya bagi mereka untuk bebas dari belenggu penjajah yang telah menekan mereka selama 450 tahun, tibalah saat untuk menghirup angin kemerdekaan, tibalah saat untuk mereka dapat berserikat, mengeluarkan pendapat yang mana hal tersebut selalu dibatasi oleh pemerintah Portugal.

Dalam waktu yang relatif singkat di Timor Timur para putra-putri terbaik Timor Timur telah membentuk partai-partai politik sebagai wadah penampungan aspirasi politik yang bergejolak akibat dari kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal.

Pada tahun 1974 yang dikenal sebagai tahun kebebasan bagi seluruh daerah jajahan Portugis, rakyat Timor Timur juga telah memanfaatkannya untuk mendirikan 5 (lima) partai politik dengan semuanya berprinsip merdeka, tidak ada satupun yang berprinsip integrasi seperti sekarang ini.

Berikut adalah kelima partai tersebut beserta prinsip/ keyakinan politiknya.

1. FRETILIN (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Indepente*) ingin merdeka langsung tanpa minta Portugal untuk menuntaskan dekolonisasi. Partai ini banyak mendapatkan dukungan dari rakyat. Mendukung partai Fretilin karena berdasarkan pada akan cepatnya bebas dari belenggu penjajahan muak terhadap sikap penjajah yang merebut hak kemerdekaan mereka. Melalui kampanye-kampanye yang bebas dan terbuka Fretilin telah menarik simpati dari mayoritas rakyat Timor Timur Rakyat secara bebas memberikan dukungan kepada Fretilin karena mereka melihat bahwa Fretilin melalui

kampanye-kampanye telah mencerminkan aspirasi mereka. Namun selama ini sering ada pandangan yang suka memutar balikan fakta, sering pula disebut rakyat itu bodoh sehingga dengan mudah terbawa atau termakan agitasi. Pandangan-pandangan demikian adalah pandangan kaum feodalis dan kaum penjajah yang tidak pernah mengakui kelebihan dari masyarakat yang dijajah, selalu berusaha untuk meremehkan bangsa tersebut agar masyarakat menjadi minder dihadapan kaum feodalis dan kaum penjajah.. Mengatakan bahwa Fretilin adalah komunis adalah suatu propaganda yang tidak mendasar juga itu adalah suatu usaha untuk menarik dukungan dari negara-negara yang tidak bersimpati kepada komunis. Rakyat Timor Timur 99 persen beragama Katolik serta budaya dan tradisi mereka bertolak belakang sekali dengan komunis, mereka mendukung Fretilin karena tahu bahwa Fretilin bukan komunis. Mendukung Fretilin karena yakin bahwa Fretilin bisa membawa aspirasi mereka.

2. UDT (*Uniao Democratica de Timor*) merupakan partai terbesar juga karena prinsipnya yang meperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Timor Timur. Perbedaannya dengan Fretilin ialah Fretilin mau merdeka langsung tanpa menuntut Portugal untuk menuntaskan proses dekolonisasi sedangkan UDT menghendaki agar Portugal menyelesaikan dulu proses dekolonisasinya. Proses dekolonisasi yang dikehendaki ialah minta Portugal untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang ada sebelum pemerintahan diserahkan ke tangan putra Timor Timur atau merdeka. Karena UDT berprinsip demikian maka rakyat tidak segan-segan memberikan dukungannya. Selama gencar-gencarnya kampanye yang dilakukan oleh pemimpin UDT pada tahun 1974 dan tahun 1975 tidak pernah terucap kata integrasi dari mulut satu orangpun. Kalau ada satu (1) dua (2) orang

pemimpin UDT yang saat ini mengatakan setuju dengan integrasi itu adalah atas nama pribadi dan tidak mewakili rakyat pendukung UDT, karena UDT berprinsip merdeka bukan integrasi, kalau lebih kasarnya mereka itu adalah penghianat rakyat Timor Timur pengikut partai UDT. Mengungsi ke Nusa Tengga Timur bukan bermaksud minta integrasi tapi karena pergolakan di Timor Timur, mengungsi ke Atambua adalah untuk menyelamatkan diri. Hal mengungsi ke negara itu adalah suatu yang lumrah terjadi dimana-mana di dunia. Saat ini dua orang pemimpin UDT yaitu Joao Carascalao sebagai panglima UDT yang pada waktu memimpin rakyat bersenjatanya mengungsi ke Atambua dan Domingos Oliveira sebagai Sekjen UDT sedang bahu membahu bersama pemimpin Fretilin serta golongan non partai di luar negeri dalam wadah Convergencia Nasionalista sedang dengan gigih memperjuangkan penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur. Domingos de Oliveira adalah salah satu dari golongan UDT yang menandatangani suatu dokumen yang sering disebut deklarasi Balibo.

3. APODETI (*Asosiacao Populer de Timor*) ialah partai yang tergolong besar dengan pengikut yang sangat minim. Prinsipnya ialah ingin membentuk suatu negara serikat dengan Indonesia bukan integrasi. Partai ini tidak begitu banyak mendapat simpati dari rakyat karena sebagai wilayah yang berbatasan rakyat Timor Timur sudah dapat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tingkat kehidupan masyarakat tetangganya sehingga untuk berserikat dengan Indonesia rakyat tidak bersimpati walaupun dalam konstitusi Republik Indonesia tidak kenal adanya suatu negara berserikat.

4. KOTA (*Klibur Oan Timor Aswain*) Partai ini berkeinginan mengembalikan Timor Timur menjadi suatu Monarki seperti dulu sebelum datangnya bangsa Portugis.

KOTA tidak berambisi saling berebut masa dengan partai yang lain, selalu menunjukkan solidaritasnya dengan partai lain. Jose Martins adalah pemimpin KOTA yang juga menandatangani proklamasi Balibo sekarang berada di Australia dan bergabung bersama pemimpin UDT dan Fertilin serta golongan non partai lainnya dibawah wadah Convergencia Nasionalista untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur.

5. TRABALHISTA ialah partai buruh yang ingin memperjuangkan nasib para buruh Timor Timur, tidak berpandangan integrasi, rakyat tahu bahwa Trabalhista ialah partai nasionalis.

Dalam suasana yang bebas masing-masing partai melakukan aktivitas politiknya. Berdasarkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal maka pemerintah tidak mendikte lagi para partai politik tersebut.

d). Pergolakan tanggal 11 Agustus 1975

Pada tanggal 11 Agustus 1975 dari golongan UDT mengambil senjata untuk menguasai keadaan, dalam satu minggu lebih golongan UDT telah bergerak di seluruh kota di Timor Timur. Pergolakan tersebut dikomandoi oleh Joao Carascalao yang sekarang berada di Australia yang dengan gigih mengibarkan panji penentuan sendiri bagi rakyat Timor Timur. Tanggal 20 Agustus 1975 karena melihat bahwa golongan UDT mulai mendesak Golongan Fretilin. Dengan dukungan dari mayoritas tentara putra Timor Timur mulai berreaksi karena golongan UDT sudah hampir menguasai situasi dengan kekuatan militer. Melihat Fretilin telah mendapat dukungan rakyat dan militer yang cukup banyak, golongan UDT tidak mampu

lagi bertahan di kota Dili maka terpaksa mengungsi ke kota namun karena terus didesak oleh golongan Fretilin maka akhirnya mereka harus masuk ke daerah Nusa Tenggara Timur untuk menyelamatkan diri.

Sebagai generasi berikutnya kami sangat sesalkan pergolakan tersebut, namun dari sisi lain kamipun sadari bahwa semua terjadi karena kurang kematangan politik dari pendahulu kami. Tetapi dari sisi lain kalau kita lihat kepada sejarah dunia maka pergolakan itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi, contoh yang sekarang masih berlanjut adalah seperti di Kamboja, Afganistan, Yogoslavia, Uni Soviet, Angola dan lain-lain. Negara-negara tetangga di sana tidak berniat menggunakan kesempatan tersebut untuk mencaplok, tetapi intervensi mereka melalui PBB adalah untuk mendamaikan. Masalah pengungsi juga sering terjadi di mana-mana dan merupakan kewajiban bagi negara yang didatangi untuk menjamin keselamatan dan penghidupan para pengungsi.

e). Proklamasi Kemerdekaan RDTL (*Republica Democratica de Timor Leste*)

Pada tanggal 28 November 1975 Timor Timur diproklamirkan menjadi suatu negara merdeka oleh partai Fretilin yang mendapat dukungan 75 persen dari rakyat Timor Timur. Proklamasi tersebut dirasa sangat urgen untuk dilaksanakan karena pada awal bulan Novembert 1975 sudah mulai ada campur tangan dari pihak tentara Indonesia di daerah perbatasan dengan daerah Nusa Tenggara Timur. Proklamasi itu adalah legitim karena mayoritas dari rakyat mendukung Fretilin. Teks Proklamasi dibacakan oleh Francisco Xavier Lopes do Amaral dan secara aklamasi dia diangkat sebagai presiden Republica Democratica de Timor Leste yang pertama.

Dikatakan urgen kerena proklamasi itu adalah untuk membendung penyerbuan oleh pihak Indonesia. Untuk misi diplomasi, presiden RDTL telah mengirim satu team yang diketahui oleh menteri luar negeri Jose Ramos Horta untuk mengutuk Indonesia di PBB karena Indonesia waktu sudah mulai terang-terangan menyerbu dari wilayah barat dan juga untuk mencari dukungan dari negara-negara anggota PBB untuk memberi pengakuannya atas proklamasi tersebut. Proklamasi *Republica Democratica de Timor Leste* telah diakui oleh 72 negara anggota PBB. Oleh karena Portugal sebagai negara kolonisator belum memberi pengakuannya maka Fretilin dengan lapang dada dan jiwa demokratis mengakui juga bahwa proklamasi itu adalah sepihak dan mengalihkan perjuangan mereka kepada hak penentuan nasib sendiri. Walaupun jika diadakan voting maka rakyat terbanyak akan tetap memberi dukungannya terhadap proklamasi tersebut. Kiranya proklamasi Kemerdekaan Timor Timur adalah sama seperti proklamasi Republik Indonesia pada tahun 1945 dan mempertahankan kemerdekaan yang kami jalankan juga sama seperti putra-putri Indonesia mempertahankan proklamasi Republik Indonesia pada saat Belanda berusaha untuk menjajah kembali.

f). Proklamasi Balibo

Deklarasi Balibo ialah suatu deklarasi tertanggal 30 November 1975 oleh para pengungsi yang dimulai pada tanggal 11 Agustus 1975. Mengenai tempat ditandatanganinya deklarasi tersebut sangat diragukan karena pada bulan dan tanggal tersebut seluruh wilayah Timor Timur dikuasai oleh FALINTIL (*Forcas Armadas de Libertacao Nasional*) artinya pasukan pembebasan Nacional Timor Timur, termasuk Balibo suatu kecamatan

yang letaknya tidak jauh dari perbatasan Nusa Tenggara Timur.

Deklarasi tersebut merupakan suatu manipulasi dari pihak Indonesia untuk mendapatkan alasan untuk menyerbu Timor Timur.

Manipulasi politik karena para penandatangan tersebut berstatus pengungsi dan sedang dalam situasi yang tidak menentu karena baru mengalami kegagalan dalam melancarkan kudeta. Dikatakan terang-terang manipulasi politik karena sampai sekarang pihak Indonesia hanya bersenyatakan deklarasi tersebut untuk melancarkan diplomasinya di forum-forum internasional sekaligus dipakai sebagai dasar untuk menyeret para penentang integritas ke pengadilan. Deklarasi yang tidak merupakan aspirasi rakyat itulah yang dipakai sebagai dasar untuk membuat undang-undang no. 7/1976 dan TAP MPR serta Kepres-Kepres lainya. Dalam keadaan terdesak mereka dipaksa untuk menandatangani deklarasi tersebut yang akhir telah membawa kekecewaan bagi mereka yang telah dipaksa untuk menandatangani deklarasi tersebut. Fakta yang mengatakan bahwa mereka benar kecewa ialah Domingos Oliveira sebagai Sekjen UDT dan Jose Martins salah satu pemimpin dari partai Kota yang juga menandatangani deklarasi tersebut saat harus meninggalkan tanah air mereka dan berstatus sebagai pengungsi di luar negeri. Untuk tetap memperjuangkan hak rakyat Timor Timur saat ini mereka bergabung dengan pemimpin lainnya dari Fretilin dan UDT serta golongan-golongan non partai dalam wadah Covergencia Nasionalista atau koalisi nasionalis yang dibentuk pada tahun 1986 di Lisabon Portugal.

Proklamasi Balibo tidak punya kekuatan hukum karena :

1. Mereka yang menandatangani berstatus pengungsi.
2. Mengenai tempat Balibo sangat diragukan karena pada

bulan dan tanggal tersebut seluruh wilayah Timor Timur yang mana termasuk juga Balibo dikuasai oleh FALINTIL.
3. Deklarasi tersebut tidak mencerminkan aspirasi rakyat karena rakyat tidak berhendak berintegrasi, fakta ini dapat dilihat pada saat rakyat memberi dukungan kepada partai-partai pada saat partai-partai itu berkampanye, partai yang hendak bergabung dengan Indonesia hanya mendapat 6 % dari suara rakyat.
4. Tandatangan tersebut tidak dilakukan di ibukota yang merupakan pusat dari segala aktivitas politik dan lain-lainnya.
5. Deklarasi tersebut ditandatangani dua hari setelah Fretilin bersama rakyat memproklamasikan kemerdekaan di ibukota Timor Timur.
6. Deklarasi tersebut sangat dan amat menyimpang dari partai-partai yang mereka (yang menandatangani) bawahi, kalaupun benar dengan ikhlas menandatangani dokumen tersebut maka mereka itu telah menghianati rakyat Timor Timur karena deklarasi tersebut tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dan mereka bertindak atas nama sendiri tidak mewakili rakyat.

Bukti lain bahwa deklarasi Balibo itu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dapat dilihat pada fakta 200.000 lebih rakyat telah menyerahkan nyawanya untuk mempertahankan tanah airnya dari ambisi teritorial Indonesia, beribu-ribu orang harus pergi meninggalkan tanah tumpah darah mereka dan hidup mendekam di penjara karena usaha mereka untuk membebaskan tanah air mereka.

III. TIMOR TIMUR SETELAH INVASI

Pada tanggal 7 Desember 1975 pagi sekitar pukul 5 pagi secara resmi dan besar-besaran ABRI menyerbu kota Dili dengan ketiga kekuatan militer yang dimilikinya yaitu

angkatan udara, angkatan laut dan angkatan darat. Dikatakan resmi karena sebelum tanggal 7 Desember yaitu pada awal bulan November 1975 pasukan sudah mulai merongrong di wilayah perbatasan dengan Nusa Tenggara Timur.

Pada pagi buta itu masyarakat kota Dili dibangunkan oleh pasukan yang diterjunkan dari udara, tembakan meriam dari kapal-kapal laut, mortir dan senjata-senjata automatis lainya dari darat. Untuk mempertahankan tanah air dan kemerdekaan maka tentara Falintil pun membalas serangankekuatan yang benar-benar unggul dalam hal persenjataan, rakyat menjadi sasaran utama dari serangan yang dilancarkan oleh ABRI. Selama beberapa hari kota Dili mengalami hujan peluru yang mengakibatkan lautan darah bagi rakyat yang tidak berdosa. Karena tidak mampu bertahan lagi di kota oleh serangan yang dilakukan dengan persenjataan yang lebih modern dan lengkap maka tentara Falintil bersama rakyat harus mundur ke pinggiran kota dan akhirnya naik gunung dan masuk kedalam goa alam dan menemui ajal mereka di goa-goa itu karena banyak dari goa-goa tertutup pintu masuknya akibat dari pemboman dari pesawat udara.

Banyak ayah mati tertembak di depan anak dan istrinya, anak harus meninggalkan orang tua mereka, banyak ibu harus membuang bayi mereka karena serangan membabi buta yang dilancarkan oleh tentara agresor.

Namun pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk menutupi bahwa itu bukan agresi militer, dengan dalih bahwa rakyatlah yang meminta. Kalau memang rakyat yang minta mengapa rakyat harus dibantai, mengapa harus diperjuangkan pasukan yang begitu besar di Timor Timur ? Untuk melawan tentara Portugis ? Orang Portugis telah diusir oleh rakyat dengan kekuatannya sendiri sebelum Indonesia menerjunkan pasukanya di Timor

Timur. Kalau memang kedatangan pasukan Indonesia adalah kemauan rakyat maka rakyat pasti menyambut dengan kalungan bunga dan tarian daerah karena itu merupakan budaya setempat. Bukan dengan tembakan, bukan dengan perlawanan. Percikan darah bukan kalungan bunga, tembak menembak bukan berbalas pantun, pembantaian bukan rangkulan dua orang sahabat.

Alasan bagi pemerintah Indonesia untuk mengatakan bahwa masuknya ABRI di Timor Timur ialah hanya berdasarkan pada Deklarasi Manipulatif yang disebut Deklarasi Balibo.

a). Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Memang dari awal tulisan sampai pada halaman ini adalah melulu hal pelanggaran hak asasi yang kami bicarakan namun pada bagian berikut kami angkat lagi adalah untuk memberi penekanan. Semua yang akan tulis dibawah ini hanya merupakan bagian terkecil dari pelanggaran yang sempat kami tahu mungkin juga telah terungkap di forum-forum internasional. Selama 16 tahun ini pemerintah selalu berusaha untuk menutupi segala kekurangan dan pelanggaran hak asasi yang telah terjadi. Satu bukti dari usaha pemerintah untuk menutupi hal-hal tersebut ialah pada peristiwa berdarah tanggal 12 November 1991 dimana aparat setempat telah berusaha untuk menutupi jumlah kematian dengan mengatakan bahwa yang tewas hanya 19 orang dengan cara menyembunyikan mayat-mayat itu walaupun ada orang asing yang telah merekam peristiwa tersebut melalui kamera video. Dari contoh ini yang ingin kami katakan ialah bahwa peristiwa di publik begitu saja masih dapat disembunyikan apalagi yang terjadi di pinggir sana! Namun seperti dalam ungkapan peribahasa mengatakan

sepintar-pintarnya orang menyembunyikan bangkai akhirnya akan tercium juga, maka yang sempat kami cium adalah sebagai berikut:

1. Dili

Pada tanggal 7 Desember 1975 hari pertama terjadinya agresi di pelabuhan laut Dili telah dibantai secara masal 160 orang sipil kebanyakan adalah wanita dan anak termasuk istri almarhum Presiden Republik Demokratik Timor Timur yang kedua dan mayat-mayat itu dibuang semua ke laut.

Di depan gedung Universitas Timor Timur pada tanggal 8 Desember 1975 satu hari agresi dibantai sekitar 60 orang sebagian besar rakyat sipil dan mayat-mayat itu dibakar di tempat sekitar satu minggu setelah pembantaian.

Tanggal 14 Desember tahun yang sama di Kali Malua, desa Bairo Pite sekarang, dibantai 14 orang pemuda, mereka disuruh baris dengan baik-baik baru ditembak, mereka ini adalah saudara sepupu saya sendiri.

Pada tanggal 18 April 1979 di Tasi Tolu Dili sebanyak 50 dieksekusi dengan alasan bahwa mereka itu mau berontak.

Tanggal 10 Juni 1980 di Tasi Tolu sebanyak 300 dieksekusi dengan tuduhan bahwa mereka itu mau berontak, mayat-mayat itu dibuang ke rawa Tasi Tolu. Korban di Dili ini belum termasuk yang dibunuh di pinggir kota.

2. Aileu

Masyarakat Aileu sebagian besar telah dimakan oleh peluru tentara Indonesia, sehingga untuk menempati kota Aileu harus didatangkan orang dari tiga daerah yaitu

Ermera, Maubise dan Lete Foho.

3. Ainaro

Sebagian besar dari beberapa desa diantaranya, Soro, Maununo, Leotelu, Hetu Mera dan Mausiga telah dibantai oleh tentara Indonesia dari tahun 1976 hingga 1984.

Pada awal tahun 1976 di Ainaro saya sendiri diserahi pistol oleh tentara untuk menembak mereka yang saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Setelah berpisah dengan mereka yang pada waktu itu diikat seperti mengikat binatang untuk disembelih sampai sekarang saya tidak menemukan mereka lagi.

Pada tahun 1979 di kecamatan Hatu Udo seorang ayah yang bernama Bernardino Feras disuruh oleh tentara untuk menggali liang kuburnya sendiri di tengah pasar kemudian disuruh berdiri di mulut liang kubur yang digali sendiri itu lalu dipukul/dibunuh dengan alu dan disuruh saksikan oleh keramaian pasar itu serta anak istrinya sendiri. Pembunuhan yang terkejam di dunia dilakukan dengan tuduhan bahwa dia sering berkontak dengan saudaranya yang masih berada di hutan.

Pada pertengahan tahun 1983 teman saya semasa SMP yang sudah menjadi anggota POLRI diikat kemudian ditarik dengan sebuah mobil kijang plat merah milik Kecamatan Ainaro mengelilingi kota Ainaro sampai mati dan mayatnya dibakar di lapangan sepak bola dan disuruh menyaksikan oleh masyarakat yang hadir waktu itu. Pembunuhan keji ini dilakukan karena dia dicurigai punya hubungan dengan para gerilawan.

4. Maubara

Di pantai Maubara, pada tanggal 16 Maret 1979 lebih dari 20 orang sipil kebanyakan keturunan Cina dibantai

dengan tuduhan mereka itu sering memberi bantuan logistik kepada para gerilawan, mayat-mayat itu tidak dikembalikan kepada keluarga.

5. Viqueque

Pada tahun 1985 penduduk desa Krararas dibantai habis oleh tentara karena tuduhan masyarakat desa tersebut sering didatangi oleh para gerilawan dan mereka telah berencana untuk memberontak.

6. Atauro

Pada tahun 1980-an ratusan orang telah meninggal dunia di kamp kosentrasi di Atauro karena kelaparan. Pulau Atauro adalah tempat pembuangan para tahanan dan orang-orang yang dicurigai berhubungan dengan para gerilawan.

7. Siksaan selama dalam tahanan

Sejak tahun 1976 sampai detik saat ini berpuluh ribu rakyat disiksa, dipaksa untuk mengatakan apa yang dikehendaki bapak, penyiksaan itu tidak mengenal tempat. Yang kejam dan tidak manusiawi adalah penyiksaan di dalam tahanan, para tahanan disiksa sampai banyak yang mati di dalam tahanan. Dipukul sampai pingsan diikat dan digantung dengan kepala kebawah lalu alat vitalnya disulut dengan puntung rokok gudang garam merah/kretek. Bagi wanita lebih-lebih biadab lagi kedalam vaginanya dimasukkan bambu runcing. Banyak juga yang pulang sudah dengan keadaan hamil.
Pada akhir tahun 1988 yang dikenal dengan kasus Santo Antonio ratusan orang ditangkap baik di Dili maupun di

kota-kota di sektor timur, mereka ini diperlukan seperti binatang, kedalam mulut dimasukan batu kemudian baru ditampar, ditinju, dibalok, ditumpu dengan senjata ditendang dengan sepatu militer dan lain-lain. Ke atas punggung ditebarkan geretan korek api lalu dinyalakan di situ seperti dinyalakan di atas kayu bakar. Dimasukkan kedalam sel sempit yang hanya dapat untuk tidur, duduk sajapun tidak bisa, selama berminggu-minggu harus berbantalkan tahi dan bermandikan kencing di dalam sel yang amat sempit tersebut.

Majelis Hakim yang kami Hormati dan hadirin yang berbahagia.

Dari sedikit peristiwa pelanggaran hak asasi di Timor Timur selama 16 tahun ini yang sempat kami angkat menunjukan kepada kita bahwa saya ini bukanlah yang pertama dan yang terakhir, sehingga dengan saya dituntut 15 tahun penjara akan terselesaikan sudah masalah Timor Timur. Perjuangan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur merupakan perjuangan generasi, fakta telah menunjukan selama 16 tahun ini. Oleh karena itu maka kami harapkan agar para penegak hukum di republik ini bisa bekerja sama dengan pihak EKSEKUTIF untuk mencarikan suatu penyelesaian yang dapat diterima oleh masyarakat internasional untuk menuntaskan masalah Timor-Timur. Menuntaskan masalah Timor Timur tidak berarti harus membantai habis semua orang yang menghendaki suatu proses demokratis bagi penyelesaian masalah itu ataupun dipenjarakan semua yang masih punya nyali untuk mengatakan aspirasi mereka.

Penyelesaian secara demokratis dan bersifat internasional yang diharapkan ialah Pemerintah Indonesia mau membuka diri dan berpikir demokratis. Bekerja sama sementara secara efektif dengan Perserikatan Bangsa-

Bangsa dan Pemerintah Portugal serta golongan-golongan lain yang terkait untuk mengadakan REFERENDUM di Timor Timur agar rakyat secara bebas menentukan masa depannya dengan menghargai suara mayoristas. Sikap kaku dan infleksibel yang selalu dipertahankan oleh masing-masing pihak hanya menyengsarakan rakyat sipil Timor Timur. Usaha Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan masalah Timor Timur dengan caranya sendiri yaitu dengan persenjataan/perang, penjara, intimidasi, teror, pembangunan dan lain-lain selama 16 tahun ini sudah tidak mempan lagi karena rakyat dengan dunia internasionalnya tidak menerimanya. Sekarang sudah tiba saatnya untuk berpikir demokratis.

Majelis Hakim Yang Mulia, Penuntut Umum Yang Berbahagia, Penasehat Hukum Yang Budiman serta Hadirin yang kami hormati.

Kiranya sudah cukup dengan 16 tahun ini rakyat Timor Timur hidup dalam suatu situasi yang dilematis dan tidak menentu. Dengan melihat pada situasi yang demikian maka kami sebagai generasi muda Timor Timur sudah berusaha untuk berpikir demokratis, sehingga tuntutan kami terhadap masalah kami (Timor Timur) hanya pada suatu proses demokratis yaitu mengadakan REFERENDUM di Timor Timur dengan diawasi langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa agar rakyat bisa dengan bebas menentukan masa depannya, mau integrasi atau mau merdeka, kalau mayoritas menghendaki integrasi kita harus menerima dan mengakui dan kalau mayoritas menghendaki merdeka juga kami harus menerima dan mengakuinya, yang jelas kami tidak bisa memisahkan diri dengan rakyat kami, orang tua kami saudara-saudara kami.

b). Sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Lima hari setelah agresi militer Indonesia yaitu tanggal 12 Desember 1975 Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang umum telah mengeluarkan resolusi nomor 3485 yang bunyinya antara lain sebagai berikut:

- Mengutuk dan mengancam Indonesia untuk menghormati hak fundamental dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur.
- Mengecam Indonesia untuk menarik mundur pasukannya dari Timor Timur tanpa syarat.
- Meminta kepada Portugal sebagai penguasa administratif untuk melanjutkan semua usahanya untuk mendapatkan atau mencapai suatu penyelesaian secara pasif dengan jalan mempertemukan pemerintah Portugal dengan partai-partai politik yang mewakili rakyat Timor Timur.
- Sangat menyesalkan intervensi militer Indonesia atas Timor Timur dll.

Pada tanggal 22 Desember 1975 Dewan Keamanan PBB bersidang dan mengeluarkan resolusi bernomor 384 dengan nada yang sama dengan resolusi Sidang Umum PBB bernomor 3485. Yang intinya minta kepada Indonesia untuk menarik mundur pasukannya dari Timor Timur dan menghormati hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Pada tanggal 22 April 1976 Dewan Keamanan PBB bersidang dan mengeluarkan resolusi bernomor 389 dengan bunyi yang sama dengan kedua resolusi yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Resolusi-resolusi dengan bunyi yang sama terus dikeluarkan oleh PBB sejak tahun 1975 hingga tahun 1982. Mulai tahun 1982 masalah Timor Timur langsung ditangani oleh Sekjen PBB Xavier Peres de Gueller dengan minta kepada pemerintah Indonesia dengan pemerintah Portugal untuk mencari penyelesaian secara damai

melalui dialog yang diawasi langsung oleh Sekjen PBB. Dialog tersebut telah berjalan dari tahun 1982 dan akhirnya kedua belah pihak telah menyepakati suatu kunjungan delegasi November 1991, namun seminggu sebelum tanggal yang telah ditetapkan timbul kembali kekacauan Indonesia tidak menyetujui keikut sertaan seorang wartawan wanita dari Australia yang bernama Jill Joliffe dengan alasan wartawan tersebut sering menulis artikel-artikel yang tidak menguntungkan bagi Indonesia. Karena Portugal juga tetap mempertahankan sikapnya yaitu wartawan itu harus ikut juga sesuai dengan kesepakatan di PBB maka kunjungan itu dibatalkan dan dialog itu pun putus sampai saat ini.

Pada awal bulan April 1992 pemerintah Portugal telah mengirim surat kepada Sekjen PBB Boutros-Boutros Ghali meminta agar dialog dilanjutkan kembali dan secara resmi Sekjen PBB telah menulis kepada pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di PBB. Setelah Nana Sutresna menyampaikan berita tersebut kepada Presiden Suharto, Presiden mengatakan bahwa Indonesia bersedia untuk melayani upaya PBB dalam mencari penyelesaian masalah Timor Timur di PBB, yaitu penyelesaian yang dapat diterima oleh masyarakat internasional (Kompas, tanggal 18 April 1992 hal. I). Dari pernyataan presiden tersebut Penuntut dapat mengetahuinya sekali lagi bahwa masalah Timor Timur bukanlah masalah dalam negeri Indonesia, oleh karena itu maka Presiden mengatakan bahwa mencari suatu penyelesaian di PBB dan dapat diterima oleh masyarakat internasional.

c). Pembangunan

Mengenai pembangunan memang tidak ada seorang yang dapat memungkirinya, hampir semua jalan di Timor Timur sudah beraspal, rumah tingkat menjulang hampir

di seluruh kota Dili, mulai ada listrik masuk desa, sekolah dibuka dimana-mana, banyak rakyat telah memiliki mobil, usaha pemberantasan buta huruf sedang giat-giatnya dilaksanakan, banyak gereja dan paroki dibangun di seluruh desa dan kecamatan dan lain-lain.

Kalau saja rakyat Timor Timur sudah berjiwa materialis kemungkinan mereka dapat menerima pembangunan itu sebagai ganti dari hak asasi mereka. Rakyat menghendaki lain, bukan rumah tingkat, jalan aspal yang dikehendaki melainkan kemerdekaan, kebebasan, manusia seutuhnya, manusia yang manusiawilah yang dicari. Hak kemerdekaan, hak kebebasan tidak dapat ditukar dengan mobil plat merah, jalan beraspal dan materi lainnya. Pembangunan merupakan suatu jeratan yang dipasang oleh pemerintah Indonesia untuk menjerat rakyat Maubere. Salah satu bukti dari pembangunan sebagai jeratan itu ialah apa yang sedang kami hadapi di pengadilan ini, salah satu alasan yang dipakai oleh penuntut umum untuk menuntut kami selama 15 tahun penjara ialah karena kami telah menerima beasiswa RP 100.000,- per bulan maka kami telah kehilangan hak untuk berbicara lagi tentang hak asasi kami. Contoh lain seperti peristiwa Santa Cruz Dili tanggal 12 November 1991, karena di Timor Timur sudah banyak pembangunannya maka masyarakat itu tidak lagi berhak untuk mengatakan aspirasinya, tapi mereka menolak hal itu maka mereka telah dibantai dan mayat mereka telah dicampur dengan batu dan pasir untuk fundasi dari bangunan itu.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Bagi kami orang Timor Timur, tidak rela nyawa kami diganti dengan jalan aspal, hak kebebasan kami dibeli dengan uang. Adalah kewajiban pemerintah ini untuk menyekolahkan kami karena hak kami telah dirampasnya.

Hak kami untuk bergabung dengan negara lain, hak kami untuk mengolah kekayaan alam kami, hak kami untuk meminta bantuan kepada luar negeri dengan mengatakan bahwa rakyat Timor Timur masih serba kekurangan seperti yang sering dilakukan oleh pemerintah ini telah diambil alih semua. Jangan hanya melihat pada apa yang telah didapat di tangan tapi hendaknya harus mempelajari juga bagaimana proses untuk mendapatkannya.

Barangkali kemiskinan, kemelaratan, keterbelakangan kami telah digadaikan juga untuk mencari bantuan. Oleh karena kemungkinan tersebut maka permohonan kami agar jangan suka menggunakan ungkapan 'untung ada saya'. Jikalau Penuntut Umum berpandangan bahwa manusia dapat ditukar hak asasi seseorang dapat dibeli maka disitulah letak perbedaan antara kita.

Dari satu sisi pemerintah ini telah berhasil dalam menjalankan strategi politik pembangunannya karena dengan itu telah memperpanjang penyelesaian masalah Timor Timur di PBB selama 16 tahun ini. Tapi kekurangannya ialah karena strategi itu tidak sesuai dengan jiwa rakyat Timor Timur.

d). Sikap Politik Rakyat Timor Timur

Mengenai sikap politik ini telah termuat dalam uraian di atas namun sengaja kami angkat lagi dalam bagian khusus ini untuk menegaskan kembali.

Rakyat Timor Timur adalah rakyat yang anti penjajahan, anti imperialisme, anti fasisme dan anti neo kolonialisme. Rakyat Timor Timur sudah mulai memperjuangkan kemerdekaannya sejak tahun 1667, pada tahun itu raja Oekusi yang bernama Francisco Ornai telah mempelopori satu pergolakan karena dia ingin dinobatkan sebagai gubernur di Timor Timur, akibat dari

pergolakan itu ia dibuang ke Flores. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi pergolakan Cova di daerah Suai, Pergolakan Cotobaba di daerah Bobonaro, pergolakan Laklo di daerah Manatutu, pergolakan Viqueque, pergolakan Vemasse dan yang terbesar sebelum perang dunia II adalah pergolakan Manufahi pada tahun 1912 yang dipimpin oleh raja Boaventura namun gagal karena kesulitan dalam hal komunikasi antara dia dengan raja-raja lain yang mana sebelumnya telah dikoordinir semua, sehingga raja Boaventura dengan rakyat sendiri yang mengadakan pemberontakan tanpa keterlibatan dari raja-raja lain. Karena kesendirian itu maka tentara Portugis berhasil mematahkannya setelah beberapa bulan bertempur. Karena didesak oleh tentara Portugis maka ia berusaha untuk melarikan diri dan akhirnya berhasil di tangkap di Balibo dan dipenjarakan di penjara Aipelo sampai beliau meninggal dunia dan jenazahnya dimakamkan di kuburan Santa Cruz Dili.

Pergolakan Manufahi ini menunjukkan keterus-terangan, kesungguhan niat dan keinginan untuk memperjuangkan kemerdekaan dan pembebasan dari pemerintah penjajah. Setelah peristiwa terbesar itu muncul lagi beberapa pergolakan seperti pergolakan Mindelo di Maubisi tahun 1939 dan pergolakan Watu-Lari tahun 1959. Jadi sebelum dan sesudah perang dunia II rakyat Timor Timur selalu mengadakan pergolakan untuk memperjuangkan kemerdekaan dan pembebasan-nya namun yang tersurat hanyalah sedikit.

Pergolakan-pergolakan telah terjadi namun belum dapat mewujudkan impian rakyat untuk mengusir penjajah dari tanah air mereka agar mereka bisa menjadi tuan rumah di rumah mereka. Namun kegagalan-kegagalan itu semakin mempertebal atau menambah harga diri mereka, semangat juang mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan dan hak asasi lainnya. Akhirnya pada tahun 1975 kemauan keras untuk

mengusir kaum penjajah dari tanah air bukan lagi merupakan impian tetapi telah menjadi kenyataan. Penjajah Portugis telah didesak dan harus angkat kaki dari bumi Timor Timur dengan kekuatan rakyat sendiri. Tetapi hanya dalam beberapa bulan saja hak yang sudah diperoleh untuk mengatur diri sendiri dirampas kembali oleh pendatang baru pada saat tuan rumah lagi sibuk mengatur rumah tangga mereka yang telah berantakan akibat dari perpindahan hak.

Untuk mempertahankan harga diri dan kemerdekaan sejak tahun 1975 bulan Desember sampai saat detik ini rakyat Timor Timur selalu melawan kependudukan Indonesia walaupun perlawanan itu harus dihargakan dengan dua ratus ribu lebih jiwa, ribuan harus mendekam dalam penjara, puluhan ribuan kehidupan jejak dan penderitaan lainnya.

Majelis Hakim yang saya muliakan, Penuntut Umum yang terhormat, Penasehat Hukum yang budiman serta hadirin yang berbahagia.

Peristiwa tanggal 12 November 1991 yang menurut kedua versi pemerintah yaitu versi pertama mengatakan bahwa korban yang jatuh 19 orang dan versi kedua mengatakan bahwa korban yang jatuh berjumlah 50 orang hanyalah merupakan bagian terkecil dari pembantaian-pembantaian yang telah terjadi selama 16 tahun. Pembantaian di pelabuhan laut Dili, pembantaian yang dilakukan dengan pesawat tempur pada tahun 1977 sampai tahun 1988 yang setiap harinya harus memakan korban rakyat sipil ratusan jiwa tidak pernah diangkat kepermukaan karena pemerintah selalu menutupinya rapat-rapat. Menghilangkan nyawa manusia adalah sesuatu yang tidak bisa diterima, mengadakan agresi dan merampas kemerdekaan suatu bangsa adalah pelanggaran hak asasi munusia. Demonstrasi yang dila-

kukan pada tanggal 12 November 1991 yang kebanyakan kaum muda adalah sesuatu yang murni dan lugu untuk mengatakan aspirasi mereka. Adalah tidak manusiawi tindakan yang dilakukan terhadap mereka dan mayat mereka harus disembunyikan. Negara Indonesia adalah negara Hukum yang tentunya segala yang dilakukan selalu berdasarkan hukum apalagi yang melakukan adalah aparat pemerintah. Mengapa pengadilan tidak mengadili para atasan yang berhubungan langsung dengan kemiliteran ? Mengapa orang yang memprotes tindakan tidak berperikemanusiaan dan amoral itu yang harus diadili dan dituntut belasan tahun ?

Invasi yang dilakukan adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ideologi negara dan konstitusi negara, mengapa pengadilan tidak mengadili para orang-orang yang mencetuskan ide invasi tersebut.

Persidangan yang berbahagia

Masyarakat Timor Timur 99 % beragama Katolik, umat Katolik selalu diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati dan selalu berpedoman pada kebenaran hakiki yang difirmankan oleh Tuhan. Gereja Katolik Timor Timur yang terbentuk dari masya- rakat Katolik Timor Timur tidak merupakan bagian dari Konferensi Wali Indonesia (KWI). Gereja Timor Timur langsung dibawahi oleh Vatican. Pada tahun 1989 MGR. Carlos Filipe Belo Ximenes uskup Timor Timur yang merupakan pemimpin Katolik tertinggi di Timor Timur sekaligus merupakan wakil Paus di Timor Timur telah secara resmi menulis surat kepada Sekjen PBB Xavier Peres de Gueller minta agar PBB mensponsori REFEREN-DUM di Timor Timur agar rakyat bisa dengan secara bebas menentukan sendiri masa depannya.

Fakta di atas menunjukkan bahwa Timor Timur

bukan merupakan bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia.

Majelis Halim Yang Mulia

Setelah kami sampaikan latar belakang dari kasus kami maka sekarang mohon diperkenankan untuk membicarakan tentang masalah yang telah kita hadapi bersama selama berminggu ini yaitu mengenai proses peradilan.

IV. PENANGKAPAN DAN PENYIDIKAN

a. Penangkapan;

- Saya ditangkap pada tanggal 24 November 1991 di pagi hari pukul 06.15 menit WITA bersama lima orang teman saya di rumah kontrakan dengan alamat Jalan Raya Sesetan Gang Taman Sari 10 Denpasar-Bali.
- Saya ditangkap oleh beberapa orang polisi dengan segerombolan orang sipil yang saya tidak pernah tahu dari instansi mana mereka berasal.
- Saat saya ditangkap petugas tidak menunjukkan surat perintah penangkapan.
- Rumah saya langsung digeledah pada saat itu juga tanpa menunjukkan surat perintah penggeledahan, mereka langsung menyerbu masuk tanpa didampingi oleh penghuni rumah.
- Saya difitnah dengan ditunjukkan kepada saya dua buah granat tangan dan dua buah bahan peledak menurut pengakuan mereka hal mana bahan tersebut tidak dibicarakan dengan serius pada penyelidikkan di kepolisian maupun di kejaksaan dan tidak diajukan di pengadilan sebagai barang bukti.
- Pada saat itu saya diancam bahwa saya akan ditembak

kalau saya bergerak.
- Sesudah di Polda Nusra saya diancam oleh banyak orang, dihina serta diejek dengan kata-kata yang tidak manusiawai.
- Saya diisolasikan sendirian dalam sebuah ruangan besar dan dilarang dikunjungi oleh teman-teman saya.
- Setiap malam sering didatangi orang-orang sipil untuk mengancam saya.
- Sebelum saya dimasukkakn ke dalam sel saya ditelanjangi, sepanjang malam saya tidak berpakaian.
- Uang dan dompet diambil semua.
- Di sel saya dilarang memiliki alat tulis menulis.

b. Penyidikan:

Selama penyidikan:

- Kami tidak pernah didampingi penasehat hukum walaupun setiap kali pemeriksaan selalu kami minta agar kami didampingi oleh penasehat hukum. Penyidik kepolisian dan Kejaksaan sering mengatakan bahwa penasehat hukum tidak hadir sedangkan penyidikan harus secepatnya selesai maka penyidikan harus terus dilanjutkan.
- Selama penyidikan kami dipaksa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dan kami tahu semua.
- Penyidikan tidak mengenal waktu, kadang dari pagi sampai tengah malam.
- Ada penyidik yang mengatakan bahwa untuk kasus subversi tidak perlu didampingi penasehat hukum.
- Kami dipaksa diperiksa walaupun dalam keadaan sakit, kalau kami menyampaikan keberatan maka jawaban mereka adalah "hanya sebentar saja".
- Selama kami ditahan oleh kejaksaan dan kami dititipkan di Rutan Polda, kami dilarang memiliki alat-alat tulis,

setiap saat sel kami diperiksa dan semua alat tulis dan tulisan kami selama proses penyidikan berjalan diambil semua.
- Pertemuan kami dengan pengacara selalu dibatasi sehingga sangat menyulitkan kami merundingkan masalah tentang Pra Peradilan. Hal ini sangat merugikan kami karena pada saat di putus selalu Majelis Hakim mengatakan gugur aduan kami mengenai proses penangkapan, penggeledahan rumah dan penyidikan yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

V. TUNTUTAN PIDANA

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada tanggal 27 April 1992 saat saya diperiksa (pemeriksaan terdakwa) saya mengatakan di depan Majelis Hakim bahwa apa yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan lebih banyak yang tidak benar, karena saya tidak didampingi oleh penasehat hukum maka pada saat saya diperiksa oleh kepolisian dan kejaksaan saya dipaksa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan walaupun saya tidak tahu dan tidak pernah melakukan apa yang ditanyakan.

2. Penuntut Umum lebih berpatokan pada Berita acara Pemeriksaan yang prosesnya berjalan tidak sesuai dengan aturan hukum untuk menuntut saya 15 tahun penjara.

3. Penuntut Umum mengatakan persidangan ini sebagai suatu sandiwara, karena telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini.

Untuk membuktikan point 2 dan 3 di atas maka di bawah ini kami sampaikan beberapa saja dari banyak hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

1. Dalam Tuntutan, halaman 56 point 1, berbunyi;
Bahwa benar pada tahun 1986 terdakwa dan saksi Joao Freitas da Camara, pernah mendengar/menerima surat terbuka dari Xanana Gusmao, panglima Fretilin di Timor Timur yang ditujukan kepada mahasiswa, pelajar dan pemuda Katolik asal Timor Timur yang ada diluar Timor Timur agar mempererat persatuan dan kesatuan dalam bentuk organisasi untuk memperjuangkan Timor Timur merdeka terlepas dari negara kesatuan R.I.

Bantahan : Saya tidak pernah membaca surat yang berjudul, *Mensagen aos jovens Katolicos de Timor Leste na Indonesia*, sesuai dengan keterangan yang saya berikan di persidangan, saksi Joao Freitas da Camara tidak mengatakan bahwa dia pernah menyampaikan surat itu kepada kami pernah membicarakan mengenai isi surat itu.

2. Dalam Tuntutan, halaman 56 point 2 berbunyi;
Bahwa benar pada tahun 1987 di Denpasar Bali terdakwa telah berbicara melalui telepon dengan Jose Ramos Horta tokoh Fretilin di Australia dimana Ramos Horta menyarankan kepada terdakwa supaya membentuk organisasi klandestine Mahasiswa dan pelajar asal Timor Timur untuk memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur telepas dari negara Kesatuan R.I.

Bantahan ; Penuntut Umum hanya berpatokan pada keterangan yang tidak benar pada Berita Acara Pemeriksaan dan membaca kesaksian dari satu orang yaitu Clemente Soares.

3. Dalam Tuntutan Pidana, halaman 56 point 4 berbunyi;
Bahwa benar terdakwa selaku ketua umum Renetil telah menunjuk dan mengambil sumpah anggota dan

pengurus Renetil cabang Jawa dan Bali untuk bersedia memperjuangkan Timor Timur terlepas dari negara kesatuan R.I.

Bantahan ;
a). Hal ini tidak sesuai dengan kesaksian yang diberikan dalam persidangan oleh saksi-saksi, Joao Freitas da Camara, Domingos Bareto, Virgilio Da Silva Gureres, Jose Luis de Oliveira. Penuntut Umum berpatokan pada keterangan tidak benar yang tertulis di BAP.

b). Para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum baik yang hanya dibacakan keterangan maupun yang dihadirkan langsung tidak ada yang bernama Jose Ave Maria, saya tidak tahu dari mana dan kapan penuntut umum ambil kesaksian dari orang tersebut.

4. Dalam Tuntutan Pidana, halaman 68 point 7 berbunyi; Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 1991, terdakwa memimpin rapat RENENTIL di Gor Malang dalam rangka konsolidasi para pengurus pusat dengan para ketua cabang Renetil, guna mematangkan rencana demonstrasi sesuai instruksi Constancio Pinto sehubungan dengan kunjungan delegasi parlemen Portugal ke Dili tanggal 4 November 1991.

Bantahan : Ini tidak sesuai dengan keterangan saksi dan tidak benar.

5. Dan lain-lain.

Tanggapan mengenai warga Negara.

Kami terpaksa memiliki Kartu Tanda Penduduk Indonesia karena tanah air kami diduduki dengan tidak sah oleh Indonesia sudah selama 16 tahun lebih, dengan

terpaksa kami memiliki KTP, tetapi warga masyarakat dunia tahu, tidak ada hukum yang mengharuskan kami jadi warga negara Indonesia.

Secara Yuridis saya adalah warga negara Portugis sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang hanya mengakui Portugal satu-satunya penguasa sah di Timor Timur. (Resolusi-resolusi PBB terlampir). Mengenai bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum rasanya tidak dapat diterima karena Jaksa Penuntut Umum sendiri tahu bahwa saya adalah orang Timor Timur yang dilahirkan di Ainaro pada tanggal 1975 Indonesia telah mengadakan intervensi militer dan segalanya berjalan tidak sesuai dengan proses yang sewajarnya.

VI KESIMPULAN

Dari keterangan dan fakta-fakta yang kami uraikan di atas maka dapat kami simpulkan sebagai berikut:

- Integrasi bukan aspirasi rakyat Timor Timur, karena sejak tahun 1975 hingga sekarang rakyat selalu menentang.
- Integrasi tidak sah; karena itu masyarakat internasional selalu mengancamnya dengan mengeluarkan resolusi-resolusi baik melalui Sidang Umum PBB maupun oleh Dewan Keamanan PBB yang isinya menuntut Indonesia agar menarik mundur pasukan dari Timor Timur dan menghormati hak penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur.
- Oleh karena integrasi tidak sah maka dasar hukum yang dipakai untuk menuntut kami juga tidak sah.
- Deklarasi Balibo adalah suatu manipulasi politik untuk mencari alasan untuk menyerbu Timor Timur.
- Rakyat Timor Timur mengusir penjajah Portugis dari bumi Timor Timur bukan integrasi melainkan untuk

merdeka.
- Niat untuk mengusir penjajah agar bisa merdeka sudah tumbuh di hati rakyat Timor Timur sejak tahun 1669.
- Kehadiran Indonesia di Timor Timur, di mata rakyat Timor Timur merupakan bangsa Portugis yang telah berganti kulit.
- Tuntutan yang dilakukan terhadap pemerintah Portugal bukan mau dijajah lagi oleh Portugal tetapi mengharapkan agar Portugal kembali untuk menyelesaikan proses dekolonisasi di Timor Timur.
- Perjuangan rakyat Timor Timur adalah untuk mempertahankan sekaligus memperjuangkan kemerdekaan.
- Rakyat mengharapkan untuk mengadakan suatu REFERENDUM di Timor Timur karena itulah satu-satunya penyelesaian yang demokratis dan tidak merugikan semua pihak.
- Penyerbuan Indoesia ke Timor Timur merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Dasa Sila Bandung dan Piagam PBB.
- Gereja Timor Timur tidak menerima integrasi.
- Pembantaian terhadap rakyat sipil pada tanggal 12 November 1991 merupakan tindakan yang sangat keji dan merupakan bagian kecil dari pembantaian yang dilakukan selama 16 tahun ini.
- Perjuangan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur sudah merupakan perjuangan generasi.
- Pembangunan di Timor Timur lebih merupakan alat politik daripada membangun manusia yang seutuhnya.

VII. PENYESALAN

Sebagai orang yang pernah mempelajari mengenai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945, sangat menyesali tindakan para penguasa yang telah

menghianati nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka berusaha untuk menyesuaikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ambisi dan ego mereka, bukan sebaliknya. Seharus mereka bersedia untuk diseret ke pengadilan oleh rakyat yang tinggal dibawah kolom jembatan dan para pencetus ide mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mempertanggung jawaban tindakan-tindakan mereka yang sangat menyimpang itu.

VIII. PERMOHONAN

Majelis Hakim yang saya hormati,

Saat ini saya dihadapkan ke pengadilan ini karena masalah Timor Timur, sebagai manusia yang normal tentu selalu ingin menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya.

Masuk dan keluar penjara karena masalah Timor Timur, saya bukanlah orang yang pertama dan kemungkinan pula bukan orang yang terakhir. Sejak tahun 1975 hingga saat detik ini sudah puluhan ribu orang yang dipenjarakan karena masalah Timor Timur tetapi situasinya tetap saja begini, tidak ada penyelesaian. Oleh karena itu maka pada kesempatan ini saya mohon kepada Majelis Hakim untuk bekerja sama dengan pihak eksekutif untuk bisa membuka diri dan bersikap kesatria dengan pemikiran yang demokratis untuk berdialog dengan semua pihak yang terkait dengan masalah Timor Timur untuk mencari pemecahan yang bersifat internasional agar bisa menyelesaikan inti dari masalah Timor Timur.

Dengan saya dituntut 15 tahun penjara dan dipenjarakan belasan tahun, bukan cara penyelesaian bagi masalah Timor Timur. Oleh karenanya maka saya

mohon kepada Majelis Hakim untuk mengatakan bahwa saya bebas dari tuntutan.

IX. PENUTUP

Sebelum kami akhiri pembelaan ini sekali lagi kami panjatkan doa kami kepada Tuhan agar menerima di sisiNya roh mereka yang telah tewas tanpa dosa apa-apa dan memberi terang dan kekuatan kepada kita yang masih hidup di dunia ini.

Terimakasih saya ucapkan kepada Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum serta hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri persidangan ini.

Semoga pembelaan ini dapat bermanfaat.

TUHAN BERSAMA KITA

Jakarta, tanggal 11 Mei 1992

Terdakwa

(Fernando de Araujo)

*** Right is right and wrong is wrong ***